



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.438, 2016

KKP. Rencana Kerja. Tahun 2016

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1127);
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra KKP Tahun 2015-2019, adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Renja KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016, yang selanjutnya disebut Renja KKP Tahun 2016, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

#### Pasal 2

- (1) Renja KKP Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan Renstra KKP Tahun 2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- (2) Renja KKP Tahun 2016 merupakan Rencana Kerja tahun kedua pelaksanaan Renstra KKP Tahun 2015-2019, serta memuat program, kegiatan, indikator kinerja, dan indikasi anggaran.
- (3) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2016 mengacu kepada Renstra KKP Tahun 2015-2019.
- (4) Renja KKP Tahun 2016 dijabarkan lebih rinci dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (5) Renja KKP Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi unit kerja eselon I dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2016.

#### Pasal 3

- (1) Indikator dan target kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 sebagai berikut:

- a. indeks Kesejahteraan Masyarakat kelautan dan perikanan sebesar 42;
- b. pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan sebesar 8%;
- c. persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautandan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar 73%;
- d. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri sebanyak 10 pulau;
- e. nilai pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sebesar 0,29%;
- f. nilai peningkatan ekonomi kelautan perikanan sebesar 0,69%;
- g. produksi perikanan sebesar 26,04 juta ton;
- h. produksi garam rakyat sebesar 3,6 juta ton;
- i. nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD 6,82 miliar;
- j. konsumsi ikan sebesar 43,88 kg/kapita;
- k. persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kelautan dan perikanan sebesar 7,5%;
- l. efektivitas tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan sebesar 76%;
- m. persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu sebesar 65,9%;
- n. tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan sebesar 73%;
- o. indeks kompetensi dan integritas sebesar 75;
- p. persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar sebesar 50%;
- q. nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar BB;
- r. nilai kinerja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 80-90 (baik); dan

- s. opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- (2) Program pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengelolaan Ruang Laut;
  - b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
  - c. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya;
  - d. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
  - e. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - f. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan;
  - g. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
  - h. Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
  - i. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
  - j. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 4

Komponen kegiatan utama yang merupakan prioritas Renja KKP Tahun 2016 berdasarkan pengelompokan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Program, Kegiatan, Sasaran, Target, Indikator Kinerja, Anggaran, serta Penanggung Jawab Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN TAHUN 2016

A. PRIORITAS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2016

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Renstra KKP Tahun 2015-2019), Visi KKP Tahun 2015-2019 adalah menjabarkan arahan Presiden bahwa “Laut adalah Masa Depan Bangsa” yaitu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Misi KKP difokuskan pada Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2016 difokuskan pada:

- a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Memberantas *IUU Fishing*, melalui:

- a) Penguatan Satuan Tugas Pemberantasan *IUU Fishing* sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Satuan Tugas (Satgas) tersebut bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh KKP, TNI AL, POLRI, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi lainnya;
- b) Penenggelaman kapal yang melakukan *illegal fishing*;
- c) Penyidikan dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan bertujuan untuk menegakkan hukum atas pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan disamping memberikan efek jera;

- d) Logistik *Detention Center* melalui operasional tahanan bagi ABK kapal yang melakukan *IUU Fishing*;
  - e) Penguatan kerja sama regional dan internasional; dan
  - f) Penerapan *Monitoring, Control and Surveillance* (MCS) secara konsisten.
- 2) Meningkatkan sistem Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terintegrasi, melalui:
- a) Penguatan sarana dan prasarana pengawasan melalui pengadaan kapal pengawas ukuran 140 meter (*multiyears*) sebanyak satu unit, pesawat patroli (*multiyears*) sebanyak enam unit, *speedboat* pengawas perikanan sebanyak lima unit, pembangunan *shelter officer* untuk awak kapal pengawas di Wilayah Timur (Bitung), peralatan selam bagi Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pembangunan stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Tual, pembangunan kantor, mess operator, gudang barang bukti penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan sebanyak sepuluh unit yang tersebar di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - b) Penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan pengawasan melalui pelatihan teknis 30 PPNS Perikanan, Pelatihan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tingkat lanjutan sebanyak 50 orang;
  - c) Pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui operasi kapal pengawas sebesar 144 hari, ketaatan kapal di pelabuhan perikanan; dan
  - d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP melalui supervisi dan monitoring Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam membantu kegiatan pengawasan SDKP di 34 provinsi.
- 3) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan, melalui:
- a) Layanan sertifikasi kesehatan ikan di 46 UPT;
  - b) Sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) sebanyak 175 sertifikat di 46 UPT;
  - c) Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan di 46 UPT;
  - d) Pemetaan lokasi penyebaran dan pengendalian penyakit ikan di 46 UPT;
  - e) Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) sebanyak 1.300 sertifikat di 46 UPT;
  - f) Penerapan *traceability* di 22 Unit Pengolahan Ikan (UPI);
  - g) Sistem aplikasi *Indonesia National Single Window* (INSW) di 16 lokasi; dan

- h) Pembangunan sarana dan pengawasan pos lintas batas Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 12 lokasi.
- b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, serta berkelanjutan, dilaksanakan melalui:
  - 1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir, melalui:
    - a) penyiapan rencana tata ruang laut nasional;
    - b) penyusunan rencana zonasi antarwilayah;
    - c) sistem informasi spasial pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka mendukung legalisasi dokumen perencanaan; dan
    - d) advokasi tata ruang laut.
  - 2) Mengelola Sumber Daya Ikan di 11 WPPNRI, melalui:
    - a) kapal penangkap ikan ukuran < 5 GT sebanyak 1.020 unit;
    - b) kapal penangkap ikan ukuran 5 GT sebanyak 1.020 unit;
    - c) kapal penangkap ikan ukuran 10 GT sebanyak 1.000 unit;
    - d) kapal penangkap ikan ukuran 20 GT sebanyak 250 unit;
    - e) kapal penangkap ikan ukuran 30 GT sebanyak 30 unit; dan
    - f) alat tangkap ramah lingkungan sebanyak 13.872 unit (bubu lipat, gillnet, dan rawai dasar).
  - 3) Mengendalikan Sumber Daya Perikanan Tangkap, melalui:
    - a) pembenahan sistem perizinan berbasis web (*on line*); dan
    - b) penguatan basis data serta pengelolaan PNBPN dari SDA Perikanan.
  - 4) Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD), melalui:
    - a) penataan ruang di PUD;
    - b) penyusunan rencana pengelolaan perikanan PUD; dan
    - c) pengaturan budidaya keramba di PUD.
  - 5) Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan, melalui:
    - a) penyediaan benih untuk masyarakat sebanyak 100 juta ekor;
    - b) pengadaan *excavator* sebanyak 100 unit;
    - c) penyediaan Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 450 unit;
    - d) penyediaan kincir air sebanyak 2.000 unit;
    - e) rehabilitasi saluran tambak partisipatif untuk 97 kelompok;
    - f) penyediaan prasarana fisik di 15 UPT Ditjen Perikanan Budidaya;
    - g) penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) saluran tambak tersier sebanyak 10 unit;
    - h) penyediaan kebun bibit rumput laut sebanyak 3.000 unit;
    - i) sertifikasi perbenihan rakyat (CPIB) sebanyak 120 unit;
    - j) silvofishery dan restocking kepiting, rajungan dan ikan lokal sebanyak 10 paket;

- k) bantuan sarana produksi budidaya ikan (pakan, benih, obat-obatan, serta perbaikan kontruksi) untuk 1.500 kelompok;
  - l) bantuan sarana produksi budidaya minapadi (benih dan pakan) sebanyak 765 paket;
  - m) bantuan paket budidaya kekerangan sebanyak 60 paket;
  - n) sertifikasi budidaya ikan rakyat (CBIB) sebanyak 1.200 unit;
  - o) percontohan budidaya teknologi *biofloc* sebanyak 5 paket;
  - p) bantuan pakan ikan sebanyak 2.000 ton; dan
  - q) bantuan pakan mandiri (alat, bahan baku pakan) sebanyak 360 paket.
- 6) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan, melalui:
- a) kapal pengangkut ikan dari *fishing ground* ke *port* ukuran 30 GT sebanyak 5 unit;
  - b) kapal pengangkut ikan dari port ke port sebanyak sebanyak 1 unit;
  - c) kapal pengangkut ikan hidup sebanyak 1 unit; dan
  - d) kapal pengolah sebanyak 1 unit.
- 7) Meningkatkan Mutu, Diversifikasi, dan Akses Pasar Produk Kelautan dan Perikanan melalui:
- a) pembangunan pasar ikan terintegrasi sebanyak 1 unit;
  - b) ice flake machine (1,5 ton/hari) sebanyak 333 unit;
  - c) ice flake machine (>10 ton) sebanyak 21 unit;
  - d) pembangunan *integrated cold storage* skala besar sebanyak 15 unit;
  - e) pembangunan *integrated cold storage* skala kecil sebanyak 14 unit;
  - f) single cold storage sebanyak 33 unit;
  - g) pembangunan pabrik rumput laut sebanyak 10 unit;
  - h) pembangunan gudang rumput laut sebanyak 7 unit; dan
  - i) pembangunan pabrik tepung ikan sebanyak 3 unit.
- 8) Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut, melalui:
- a) rehabilitasi wilayah pesisir melalui penanaman *mangrove* sebanyak 4 juta batang;
  - b) penanaman vegetasi pantai sebanyak 500 ribu batang; dan
  - c) pembangunan pelindung pantai (*hybrid engineering*) sepanjang 296 ribu meter.
- 9) Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil, melalui pembangunan pulau kecil terintegrasi di 15 lokasi yaitu Simeuleu (Aceh), Mentawai (Sumatera Barat), Natuna (Kep. Riau), Nunukan (Kalimantan Utara), Tahuna (Sulawesi Utara), Talaud (Sulawesi Utara), Saumlaki (Maluku), Rote (NTT), Morotai (Maluku Utara), Kisar (Maluku), Maluku Tenggara Barat (Maluku), Tual (Maluku), Merauke (Maluku Tenggara Barat), Sarmi (Papua), Yapen (Papua), dan Biak Numfor (Papua), dengan komponen kegiatan di antaranya: penyusunan *master plan* dan *business plan*, dermaga/jetty, SPDN, *cold*

*chain system*, kapal penangkap ikan dan alat tangkap, sarana budidaya, *speedboat* pengawasan, *gateway services* untuk karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan, pelatihan, penyuluhan, dan kelembagaan koperasi. Selain itu, KKP juga bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui penyediaan listrik, air bersih, dan rumah singgah.

- c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam melalui:
    - a) asuransi nelayan untuk 1 juta nelayan;
    - b) bantuan sarana mata pencaharian alternatif nelayan pada musim paceklik untuk 136 RTP (Rumah Tangga Perikanan);
    - c) Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan (SEHAT Nelayan) sebesar 20 ribu bidang;
    - d) sertifikasi tanah pembudidaya sebesar 15 ribu bidang;
    - e) bantuan sarpras PUGAR (saluran, jalan produksi, jalan produksi nonsentra, perata tanah, geoisolator, pompa) di 30 kab/kota; dan
    - f) bantuan sentra niaga garam (kios garam, gudang penyimpanan garam) di 10 kabupaten/kota.
  - 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan: melalui pemberdayaan (penguatan akses permodalan dan penguatan kelembagaan) masyarakat KP;
  - 3) Meningkatkan usaha dan investasi kelautan dan perikanan melalui: pembinaan usaha masyarakat serta peningkatan investasi bidang kelautan dan perikanan, kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan/nonbank, serta pelayanan informasi dan inkubasi bisnis bagi UMKM;
  - 4) Meningkatkan kompetensi masyarakat KP melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, melalui:
    - a) pembangunan politeknik KP sebanyak 5 unit;
    - b) pembangunan taman teknologi sebanyak 8 unit;
    - c) pendidikan anak pelaku utama sebanyak 7.225 orang; dan
    - d) pelatihan masyarakat sebanyak 40 ribu orang.
  - 5) Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang KP, melalui:
    - a) pembangunan kapal riset kelautan dan perikanan sebanyak 1 unit;
    - b) pembangunan pusat riset kelautan sebanyak 2 unit;
    - c) *research buoy* sebanyak 10 unit;

- d) litbang perikanan yang inovatif dan implementatif (pengkajian stok kuota dan alokasi sumberdaya ikan di 11 WPP-NRI dan KPP PUD (Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan), rekayasa teknologi dan genetika induk/benih/bibit unggul budidaya perikanan;
- e) litbang pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing (produk perikanan, bioteknologi, dan garam);
- f) litbang sosial ekonomi kelautan dan analisis kebijakan kelautan dan perikanan;
- g) litbang sumber daya laut dan pesisir (perubahan iklim, pemanfaatan ruang laut;
- h) pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan; dan
- i) peningkatan *knowledge based management system*.

B. Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

Arah kebijakan, strategi, dan langkah operasional tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

PAGU ALOKASI ANGGARAN KKP TAHUN 2016

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp. 000)
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.513.629.229
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	1.676.038.704
3.	Program Penguatan Daya Saing Produk KP	1.814.669.841
4.	Program Pengawasan Pengelolaan SDKP	1.838.304.293
5.	Program Pengelolaan Ruang Laut	1.411.472.567
6.	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek KP	888.929.232
7.	Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP	1.446.679.775
8.	Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	669.945.257
9.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	442,557.657

	Tugas Teknis Lainnya KKP	
10.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KP	98.966.176
	JUMLAH	13.801.192.731

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 8/PERMEN-KP/2016  
 TENTANG  
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN TAHUN 2016

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016**

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2016	Anggaran 2016
<b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>15,752.67</b>
	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP			
		Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	42	
		Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	8,00	
	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP			
		Persentase kepatuhan ( <i>compliance</i> ) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	73	
		Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri	10	
	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan			
		Nilai pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan	0,29	
		Nilai peningkataan ekonomi KP	0,69	

		Produksi perikanan (juta ton)	26,04	
		Produksi garam rakyat (juta ton)	3,6	
		Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,82	
		Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	43,88	
		Persentase peningkatan PNBPD dari sektor KP (%)	7,5	
	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6,5	
	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan	76%	
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif			
		Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%)	65,9%	
		Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	73%	
	Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional, dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas	89	
	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	50%	
	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai kinerja reformasi birokrasi KKP	BB	
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel			
		Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (80-90)	
		Opini atas laporan keuangan KKP	WTP	



<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KKP</b>				<b>624.06</b>
	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6,5	
	Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional, dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas	89	
	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	50%	
	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Indeks reformasi birokrasi KKP	BB	
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel			
		Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (80-90)	
		Opini atas Laporan Keuangan KKP	WTP	
<b>Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP</b>				
	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Indeks reformasi birokrasi KKP	BB	
	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6,5	
	Terwujudnya naskah kerja sama dan perjanjian internasional dan antarlembaga yang efektif	Persentase penyelesaian naskah kerja sama dan perjanjian internasional dan antarlembaga	85	
<b>Pengelolaan Kepegawatan KKP</b>				

	Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional, dan berkepribadian			
		Indeks kompetensi dan integritas	89	
		Persentase perencanaan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai sesuai kebutuhan	100%	
		Persentase pelayanan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pensiun, dan mutasi pegawai yang tepat waktu	100%	
		Persentase pelayanan administrasi dan pengembangan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	100%	
		Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan Biro Kepegawaian yang tepat waktu	100%	
<b>Pengelolaan Keuangan KKP</b>				
	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima			
		Tingkat ketaatan terhadap SAP (%)	100	
		Tingkat kepatuhan terhadap SPI (%)	100	
		Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK KKP	cukup	
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan KKP	WTP	
	Terwujudnya pengelolaan BMN lingkup KKP yang optimal	Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan BMN lingkup KKP sesuai SOP (%)	70	
<b>Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Pelaporan KKP</b>				
	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai SAKIP KKP	A	

	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	50%	
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran KKP	Baik (80-90)	
	Terselenggaranya koordinasi perencanaan, penganggaran, dan monev, serta pelaporan pembangunan KP	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	3	
<b>Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP</b>				
	Tersedianya prasarana kantor pusat KKP yang memadai	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor (%)	75	
	Terwujudnya pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP yang optimal	Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP sesuai SOP (%)	85	
	Terwujudnya pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan, dan kearsipan KKP yang optimal			
		Persentase pencapaian standar pelayanan ketatausahaan pimpinan sesuai SOP (%)	87	
		Persentase pencapaian standar pelayanan administrasi persuratan dan kearsipan KKP serta ketatausahaan Biro sesuai SOP (%)	87	
	Terwujudnya pengelolaan BMN Setjen yang optimal	Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan BMN Setjen sesuai SOP (%)	70	
	Terselenggaranya layanan pengadaan dan perizinan terpadu	Persentase pemenuhan layanan pengadaan dan perizinan terpadu	100	
	Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran			
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Setjen (%)	100	
		Persentase pemenuhan layanan perkantoran Setjen (%)	100	

<b>Perumusan Kebijakan Kelautan</b>				
	Tersedianya rumusan kebijakan pembangunan kelautan nasional	Jumlah dokumen rumusan kebijakan (dokumen)	1	
<b>Pengelolaan Kerja Sama KP dan Hubungan Masyarakat</b>				
	Terwujudnya kerja sama internasional dan antarlembaga yang implementatif	Jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian bidang KP yang telah disepakati dan diimplementasikan (buah)	30	
	Terwujudnya citra positif KKP di masyarakat	Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan sektor KP (%)	< 10%	
<b>Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP</b>				
	Tersedianya data statistik dan informasi KP yang valid, handal, dan mudah diakses			
		Persentase partisipasi aktif unit kerja eselon I lingkup KKP dalam menggunakan layanan SIDATIK (%)	100	
		Indeks pemanfaatan informasi KP berbasis IT (%)	> 75%	
	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	50%	
	Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran			
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai PUSDATIN (%)	100	
		Persentase pemenuhan layanan perkantoran PUSDATIN (%)	100	
<b>Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan</b>				

	Tersedianya permodalan usaha kelautan dan perikanan untuk kelompok masyarakat	Persentase modal usaha yang tersalurkan (%)	> 75%	
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KKP</b>				<b>110.17</b>
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel			
		Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dari total anggaran KKP	≤ 1	
	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima			
		Nilai <i>Integrity Assessment</i> KKP	<b>8.25</b>	
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KKP	<b>A</b>	
		Nilai evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi KKP	<b>A</b>	
		Jumlah unit kerja berstatus WBK (Kumulatif)	<b>6</b>	
		Level Kapabilitas Itjen (IACM)	<b>3</b>	
<b>Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP</b>				
	Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan internal lingkup mitra Inspektorat I yang berbasis Risiko	Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup mitra Inspektorat I	100	
	Terselenggaranya pengawasan internal lingkup mitra Inspektorat I dan KKP yang efektif dan efisien		3 LHP	
		Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dari total anggaran KKP	≤ 1	

		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat I	82.5	
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat I	82.5	
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang strategis lingkup KKP dan mitra Inspektorat I (per tahun)	6	
		Persentase cakupan lokasi pengawasan pelaksanaan <i>Quick Wins</i> pada mitra Inspektorat I (%)	60	
	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal pada mitra Inspektorat I yang Efektif			
		Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat I	82	
		Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I	82	
	Terselenggaranya dukungan internal pengawasan Inspektorat I sesuai kebutuhan	Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat I (%)	95	
<b>Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP</b>				
	Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan internal lingkup mitra Inspektorat II yang berbasis Risiko	Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup mitra Inspektorat II	100	

	Terselenggaranya pengawasan internal lingkup itra Inspektorat II dan KKP yang efektif dan efisien	Nilai integritas pelayanan publik KKP	8.25	
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat II	82.5	
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat II	82.5	
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang strategis lingkup KKP dan mitra Inspektorat II (per tahun)	8	
		Persentase cakupan lokasi pengawasan pelaksanaan <i>Quick Wins</i> pada mitra Inspektorat II (%)	60	
	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal pada mitra Inspektorat II yang Efektif			
		Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup mitra Inspektorat II	82	
		Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat II	82	
	Terselenggaranya dukungan pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat II sesuai kebutuhan			
		Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja Inspektorat II	95	
	<b>Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP</b>			

	Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan internal lingkup mitra Inspektorat III yang berbasis Risiko			
		Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup mitra Inspektorat III	100	
	Terselenggaranya pengawasan internal lingkup mitra Inspektorat III dan KKP yang efektif dan efisien			
		Evaluasi akuntabilitas kinerja KKP	A	
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat III	82.5	
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat III	82.5	
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang strategis lingkup KKP dan mitra Inspektorat III (per tahun)	8	
		Persentase cakupan lokasi pengawasan pelaksanaan <i>Quick Wins</i> pada mitra Inspektorat III (%)	60	
	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal pada mitra Inspektorat III yang Efektif			
		Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup mitra Inspektorat III	82	
		Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Pulau-Pulau Kecil terpadu (P2KT) lingkup Inspektorat III	82	

	Terselenggaranya dukungan pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat III sesuai kebutuhan			
		Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja Inspektorat III	95	
<b>Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP</b>				
	Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan internal lingkup mitra Inspektorat IV yang berbasis Risiko	Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup mitra Inspektorat IV	100	
	Terselenggaranya pengawasan internal lingkup mitra Inspektorat IV dan KKP yang efektif dan efisien			
		Nilai evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi KKP	A	
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat IV	82.5	
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat IV	82.5	
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang strategis lingkup KKP dan mitra Inspektorat IV (per tahun)	8	
		Persentase cakupan lokasi pengawasan pelaksanaan <i>Quick Wins</i> pada mitra Inspektorat IV (%)	60	
	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal pada mitra Inspektorat IV yang efektif			

		Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup mitra Inspektorat IV	82	
		Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat IV	82	
	Terselenggaranya dukungan pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat IV sesuai kebutuhan	Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja Inspektorat IV	95	
<b>Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V dan Pelaksana Pembangunan KP</b>				
	Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan internal lingkup mitra Inspektorat V yang berbasis Risiko			
		Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup mitra Inspektorat V	100	
	Terselenggaranya pengawasan internal lingkup mitra Inspektorat V dan KKP yang efektif dan efisien			
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat V	82.5	
		Persentase jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP	82.5	
		Jumlah unit kerja berstatus WBK (Kumulatif)	6	
		Jumlah unit kerja yang dipersiapkan menjadi WBK	10	

		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat V	82,5	
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang strategis lingkup KKP dan mitra Inspektorat V (per tahun)	2	
		Persentase cakupan lokasi pengawasan pelaksanaan program prioritas lingkup KKP (%)	60	
	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal pada mitra Inspektorat V yang Efektif			
		Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup mitra Inspektorat V	82	
		Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat V	82	
	Terselenggaranya dukungan pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat V sesuai kebutuhan			
		Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja Inspektorat V	95	
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KKP</b>				
	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6,5	
	Tersedianya ASN KKP yang kompeten dan profesional			
		Indeks kompetensi dan integritas	75	
		Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standar diklat (%)	60	

	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses lingkup Itjen			
		Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Itjen (%)	50	
		Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT lingkup Itjen (%)	60	
	Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima			
		Nilai penerapan reformasi birokrasi Itjen	BB	
		Nilai SAKIP Itjen	A	
		Indeks persepsi pegawai KKP terhadap Itjen	4,35	
		Level kapabilitas Itjen (IACM)	3	
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien			
		Nilai efisiensi anggaran Itjen (%)	>95	
		Tingkat kewajaran pengungkapan LK Itjen	WTP	
	Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran			
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Itjen (%)	100	
		Persentase pemenuhan layanan perkantoran Itjen (%)	100	
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>1,025.13</b>

	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan	Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang ditetapkan potensi sumber daya KP untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan	11 WPP 6 KPP PUD	
	Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian dan pengembangan (Litbang) dan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang mendukung kesejahteraan masyarakat KP	Jumlah rekomendasi penelitian dan pengembangan yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan	45	
	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Jumlah inovasi KP yang diadopsi	75	
		Jumlah inovasi teknologi KP yang terekomendasikan untuk masyarakat dan/atau industri	76	
<b>Penelitian dan Pengembangan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi KP</b>				
	Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan KP berdasarkan data dan informasi ilmiah litbang daya saing produk dan bioteknologi KP			
		Jumlah data dan informasi Litbang daya saing produk dan bioteknologi KP	13	
		Jumlah karya tulis ilmiah bidang iptek daya saing produk dan bioteknologi KP yang diterbitkan	65	
		Pl. Jumlah rekomendasi iptek daya saing produk dan bioteknologi KP	6	

	Tersedianya hasil riset dan pengembangan penerapan/ pemanfaatan daya saing produk dan bioteknologi KP			
		Jumlah bahan usulan HKI daya saing dan bioteknologi KP	1	
		Jumlah komponen inovasi teknologi daya saing produk dan bioteknologi KP	8	
		Jumlah inovasi teknologi daya saing produk dan bioteknologi KP	12	
	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya litbang dan layanan iptek daya saing produk dan bioteknologi KP			
		Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang daya saing produk dan bioteknologi KP yang ditingkatkan kapasitasnya	1	
		Jumlah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis litbang iptek daya saing dan bioteknologi KP	1	
<b>Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan KP</b>				
	Tersedianya rekomendasi dan analisis kebijakan KP berdasarkan data dan informasi ilmiah penelitian sosial ekonomi KP			
		Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan KP berkelanjutan	11	
		Jumlah rekomendasi sosial ekonomi KP	6	
		Jumlah data dan/atau informasi sosial ekonomi KP	10	
		Karya tulis ilmiah bidang penelitian sosial ekonomi dan analisis kebijakan KP	30	

	Terwujudnya hasil litbang yang inovatif dan implementatif di bidang sosial ekonomi KP			
		Model sosial ekonomi pembangunan sektor KP	8	
	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya litbang dan layanan iptek di bidang sosial ekonomi KP			
		Pl. Jumlah sarana prasarana litbang sosial ekonomi KP yang terfasilitasi	1	
		Jumlah Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Litbang Iptek Sosial Ekonomi KP	1	
<b>Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan</b>				
	Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan perikanan yang implementatif berdasarkan data dan informasi ilmiah			
		Jumlah rekomendasi dan masukan kebijakan litbang perikanan	21	
		Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) laut yang teridentifikasi karakteristik biologi perikanan serta habitat sumber daya, potensi produksi, kapasitas penangkapan ikannya	11	
		Jumlah Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang teridentifikasi karakteristik biologi perikanan serta habitat sumber daya, potensi produksi, kapasitas penangkapan ikannya	8	
		Jumlah konservasi habitat dan/atau sumber daya ikan	5	
		Jumlah data dan informasi litbang perikanan	41	

		Jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan	332	
	Terwujudnya hasil litbang yang inovatif di bidang perikanan			
		Jumlah bahan usulan HKI perikanan	3	
		Jumlah inovasi teknologi perikanan	76	
		Jumlah komponen inovasi perikanan	32	
	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya litbang dan layanan iptek pengelolaan perikanan			
		Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan litbang perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	11	
		Jumlah dukungan teknis litbang perikanan	11	
<b>Penelitian dan Pengembangan Iptek Instrumentasi KP</b>				
	Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan KP berdasarkan data dan informasi ilmiah litbang instrumentasi KP			
		Jumlah rekomendasi litbang instrumentasi KP	4	
		Jumlah data dan informasi litbang instrumentasi KP	3	
		Jumlah karya tulis ilmiah bidang litbang instrumentasi KP	32	
	Tersedianya hasil litbang yang inovatif di bidang instrumentasi KP			
		Jumlah bahan usulan HKI instrumentasi KP	1	
		Jumlah inovasi teknologi instrumentasi KP	6	
		Jumlah komponen inovasi instrumentasi KP	4	
	Tersedianya sistem informasi di Sentra Nelayan hasil litbang instrumentasi KP	QW: Jumlah Sentra Nelayan yang terbangun sistem informasi nelayan	30	
	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya litbang dan layanan iptek instrumentasi KP			



		Jumlah prasarana/infrastruktur instrumentasi KP	1	
		Jumlah sarana dan prasarana serta kelembagaan litbang instrumentasi KP yang ditingkatkan kapasitasnya	5	
		Jumlah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis litbang instrumentasi KP	1	
<b>Penelitian dan Pengembangan Iptek Sumber Daya Laut dan Pesisir</b>				
	Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan KP berdasarkan data dan informasi ilmiah litbang kewilayahan, dinamika, dan sumber daya laut dan pesisir			
		Jumlah rekomendasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan	10	
		Jumlah kawasan pesisir yang terpetakan sumber dayanya	5	
		Jumlah WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut	5	
		Jumlah data dan /atau informasi sumber daya dan laut dan pesisir	8	
		Karya tulis ilmiah litbang sumber daya laut dan pesisir	45	
	Terwujudnya hasil litbang sumber daya laut dan pesisir yang inovatif			
		Jumlah inovasi teknologi sumber daya laut dan pesisir	15	
		Jumlah komponen inovasi sumber daya laut dan pesisir	8	
		Jumlah bahan usulan HKI sumber daya laut dan pesisir	1	

	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya litbang dan layanan iptek pengelolaan sumber daya laut dan pesisir			
		Jumlah sarana prasarana litbang iptek sumber daya laut dan pesisir	2	
		Jumlah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis litbang iptek sumber daya laut dan pesisir	2	
<b>Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP</b>				
	Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pengelolaan inovasi dan alih teknologi KP yang implementatif	Rekomendasi kebijakan penerapan dan alih teknologi	7	
	Terwujudnya pengelolaan inovasi dan alih teknologi KP			
		Jumlah teknologi yang direkomendasikan	10	
		Jumlah adopsi dan /atau kerjasama Iptek	75	
		Jumlah usulan HKI KP ke Lembaga Paten Nasional	6	
		Jumlah teknologi yang dikomersilkan	1	
		Jumlah penyetaraan teknologi KP	12	
	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya litbang dan layanan pengelolaan inovasi dan alih teknologi KP			
		Jumlah sarana dan prasarana serta kelembagaan pengelolaan inovasi dan alih teknologi KP yang ditingkatkan kapasitasnya	3	
		Jumlah dukungan teknis pengelolaan inovasi dan alih teknologi KP	1	
<b>Penelitian Kewilayahan dan Klimat KP</b>				

	Tersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan KP berdasarkan data dan informasi ilmiah penelitian kewilayahan dan iklim KP			
		Jumlah rekomendasi penelitian kewilayahan dan iklim KP	4	
		Jumlah kawasan KP yang terpetakan sumber daya lahannya	4	
		Jumlah data dan informasi penelitian kewilayahan dan iklim KP	2	
		Jumlah karya tulis ilmiah bidang penelitian kewilayahan dan iklim KP	15	
	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya litbang dan layanan iptek kewilayahan dan iklim KP			
		Jumlah sarana dan prasarana serta kelembagaan litbang kewilayahan dan iklim KP yang ditingkatkan kapasitasnya	1	
		Jumlah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis litbang kewilayahan dan iklim KP	1	
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang KP</b>				
	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6,5	
	Terwujudnya ASN Balitbang KP yang kompeten, profesional, dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas lingkup Balitbang KP	75	
	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	50%	
	Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima			

		Peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi Balitbang KP	BB	
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balitbang KP	>95%	
	Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran			
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Pusat Balitbang KP (%)	100	
		Persentase pemenuhan layanan Sekretariat perkantoran (%)	100	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
	SDM KP memiliki kompetensi sesuai kebutuhan			<b>1,678.66</b>
		Persentase lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan terhadap lulusan pendidikan KP	95%	
		Persentase anak pelaku utama yang diterima di satuan pendidikan KP terhadap peserta didik baru	44%	
		Persentase lulusan pelatihan yang dapat menerapkan hasil pelatihannya terhadap yang dilatih	90%	
	Masyarakat KP yang memiliki kemandirian			
		Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang tingkat kelasnya (keompok)	5,400	

		Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat usahanya dari skala mikro ke skala kecil, skala kecil menjadi skala menengah (orang)	10,000	
<b>Pelatihan KP</b>				
	Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai standar kompetensi kerja nasional/standar kompetensi kerja khusus di bidang KP			
		Jumlah masyarakat KP yang dilatih (orang)	35,000	
		Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang kompeten (orang)	8,000	
		Jumlah masyarakat KP yang dilatih bersertifikat kompetensi (orang)	29,750	
	Tersedianya lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di bidang KP			
		Jumlah lembaga pelatihan KP sesuai standar (unit)	431	
		Jumlah rancangan standar kompetensi kerja KP (buah)	14	
		Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi KP (unit)	25	
	Tersedianya Taman Teknologi KP	Jumlah taman teknologi KP (unit)	8	
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien			
		Persentase dokumen penatausahaan kegiatan pelatihan KP	100%	
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai UPT Pelatihan KP (%)	100%	
<b>Pendidikan KP</b>				
	Terpenuhiya tenaga terdidik yang kompeten sesuai standar			

		Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang)	6,725	
		Jumlah SDM KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (orang)	110	
		Jumlah satuan pendidikan KP yang terakreditasi sesuai standar (unit)	13	
	Peningkatan kapasitas masyarakat KP dalam mendapatkan akses pendidikan	Jumlah warga belajar yang mendapatkan akses pendidikan vokasi KP (orang)	500	
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien			
		Persentase dokumen penatausahaan kegiatan pendidikan KP	100%	
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai UPT Pendidikan KP (%)	100%	
<b>Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP</b>				
	Meningkatnya jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha di kawasan perikanan			
		Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)	60,000	
		Jumlah petugas yang melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP (orang)	16,300	
		Penerapan inovasi teknologi melalui percontohan penyuluhan (unit)	68	
		Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan akses pembiayaan dan permodalan (orang)	2,000	

	Meningkatnya daya saing penyuluh dan berkembangnya kelompok yang disuluh dalam rangka pemberdayaan mendukung peningkatan produksi usaha perikanan			
		Jumlah kelompok yang disuluh mendukung peningkatan produksi usaha perikanan oleh penyuluh perikanan (kelompok)	2,250	
		Jumlah pendamping KP yang meningkat daya saingnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendukung peningkatan produksi usaha perikanan (orang)	2,250	
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien	Persentase dokumen penatausahaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP	100%	
<b>Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat KP</b>				
	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6,5	
	Terwujudnya ASN BPSDMKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks Kompetensi dan Integritas lingkup BPSDMKP	77	
	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	50%	
	Terwujudnya birokrasi BPSDMKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima			
		Peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi BPSDMKP	BB	
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran BPSDMKP	Baik (80-90)	

	Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran			
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Pusat BPSDM KP (%)	100	
		Persentase pemenuhan layanan Sekretariat perkantoran (%)	100	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>				
	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan	Pertumbuhan PDB Perikanan	8,00	
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105.0	
		Rata-Rata pendapatan:		
		a. Pendapatan RTP/bulan (Rp/RTP/bulan)	5,485,100	
		b. Pendapatan Nelayan/bulan (Rp/nelayan/bulan)	2,068,200	
	Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan	Jumlah produksi perikanan tangkap		
		a. Volume produksi (ton)	6,451,330	
		b. Nilai Produksi (Rp juta)	125,174,890	
		Nilai investasi usaha perikanan tangkap (Rp triliun)	23	
		Jumlah penyaluran akses pemodal perikanan tangkap (Rp milyar)	900	
		Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) (WPP)	5	
<b>Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan</b>				
	Terwujudnya kapal perikanan Indonesia, alat penangkap ikan, dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP			
		Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan (unit)	1200	

		Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan (unit)	3150	
		Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit)	20000	
		Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi dari inovasi alat penangkap standar dan sertifikasi dari inovasi kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkap ikan yang dihasilkan (buah)	25	
		Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang)	1200	
		Jumlah operasional kapal yang dihitung produktivitasnya (unit)	800	
		Jumlah kapal yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal (unit)	400	
	Meningkatnya armada perikanan tangkap nasional yang modern, efisien, dan berdaya saing			
		Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit)	3300	
		Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasikan (unit)	16,675	
		Jumlah kapal > 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan (unit)	25	
		Jumlah fasilitasi konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan	1000	
	Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkap ikan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan (%)	100	

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan				
	Meningkatnya kapasitas pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan			
		Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran (lokasi)	110	
		Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan SHTI (lokasi)	32	
		Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional (lokasi)	30	
		Jumlah pelabuhan perikanan yang dilakukan pengendalian pembangunan konstruksi (lokasi)	50	
		Jumlah identifikasi dan penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan (termasuk fasilitasi dan koordinasi pengembangan sentra perikanan terpadu) (lokasi)	34	
		Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar pelayanan ISO-9001 (lokasi)	5	
	Berkembangnya pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah			
		Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan daerah prioritas (lokasi)	-	
		Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan UPT Pusat (lokasi)	22	
		Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan/ <i>ecoport</i> (lokasi)	-	
		Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal menerapkan sistem informasi dan keterpaduan (lokasi)	120	
		Jumlah pengembangan sentra perikanan terpadu (lokasi)	-	

	Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (%)	100	
<b>Pengendalian Penangkapan Ikan</b>				
	Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu			
		Jumlah alokasi izin yang diberikan terhadap peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang tersedia (unit)	12,500	
		Waktu pelayanan izin usaha penangkapan ikan (SIUP) (hari kerja /dokumen permohonan)	9	
		Waktu pelayanan izin kapal penangkap/pengangkut ikan (SIPI, SIKPI) (hari kerja/dokumen permohonan)	6	
		Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi dalam SIUP (unit)	11,250	
		jumlah kapal penangkapan ikan yang memenuhi kepatuhan usaha (%)	100	
	Meningkatnya pengendalian penangkapan ikan nasional			
		Jumlah unit usaha penangkapan ikan yang terevaluasi (unit)	2	
		Jumlah penguatan dan integrasi sistem perizinan pusat-daerah (Prov/Kab/Kota)	15	
		Jumlah pengelolaan basis data dan informasi usaha penangkapan ikan pusat-daerah (Prov)	15	
		Jumlah unit usaha penangkapan ikan yang terevaluasi (unit)	1	

	Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengendalian penangkapan ikan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan (%)	100	
<b>Pengelolaan Kenelayanan</b>				
	Meningkatnya kapasitas kenelayanan			
		Jumlah penguatan kelembagaan usaha nelayan (kelompok)	2,050	
		Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (lokasi)	34	
		Jumlah nelayan yang mampu mengelola usahanya (orang)	2,080	
		Jumlah diversifikasi usaha keluarga nelayan (Rumah Tangga Perikanan/RTP)	1,040	
		Jumlah pembinaan sistem informasi kenelayanan (lokasi)	2	
	Meningkatnya perlindungan kenelayanan			
		Jumlah kawasan sentra/kampung nelayan yang ditata dan terintegrasi (lokasi)	100	
		Jumlah nelayan yang terlindungi (orang)	1,000,000	
		Jumlah fasilitas sertifikasi tanah nelayan (bidang tanah)	20,000	
	Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan penguatan kenelayanan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Kenelayanan (%)	100	
<b>Pengelolaan Sumber Daya Ikan</b>				
	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) yang berkelanjutan di perairan laut dan perairan pedalaman			
		Jumlah ekosistem perairan pedalaman yang direvitalisasi (lokasi)	6	
		Jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (WPP)	7	

		Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	4	
		Jumlah perairan yang terevaluasi pengelolaan sumber daya ikannya (WPP)	6	
		Jumlah resolusi dan CMM RFMO yang diimplementasikan (buah)	3	
		Jumlah inisiasi pengembangan kelembagaan pengelolaan WPP (wilayah)	1	
	Meningkatnya ketersediaan data, informasi dan statistik perikanan tangkap yang akurat untuk pengelolaan SDI			
		Jumlah ketersediaan data dan statistik perikanan tangkap (dokumen)	7	
		Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)	500	
		Jumlah kapal perikanan yang dipantau oleh observer (unit)	150	
	Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan	Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (%)	100	
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</b>				
	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6,5	
	Terwujudnya ASN DJPT yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks kesenjangan kompetensi pejabat struktural dan fungsional lingkup DJPT (%)	84	
	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dan berbasis IT (%)	80	
	Terwujudnya birokrasi DJPT yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPT	BB	

	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran lingkup DJPT (%)	Baik (80-90)	
	Terpenuhinya belanja aparaturnya dan belanja operasional perkantoran			
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPT (%)	100	
		Persentase pemenuhan layanan perkantoran DJPT (%)	100	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN BUDIDAYA</b>				<b>2,033.49</b>
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya.			
		Produksi perikanan budidaya (juta ton)	19.46	
		- Ikan (juta ton)	8.35	
		- Rumpuk Laut (juta ton)	11.11	
		Ikan Hias (milyar ekor)	1.90	
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	8.00	
		Jumlah kredit program bidang perikanan budidaya yang disalurkan (Rp. Miliar)	325.00	
		Jumlah investasi bidang perikanan budidaya (Rp. Miliar)	24.000	
		Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)	102.25	
<b>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan</b>				
	Tersedianya kebijakan pembangunan bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang implementatif			
		Jumlah RSNI-3 sub bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang disusun (judul, nonkumulatif)	5	

	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang berdaya saing dan berkelanjutan			
		Jumlah laboratorium penyakit ikan, kualitas air, pakan, dan residu yang memenuhi standar teknis (unit, kumulatif)	57	
		Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel, nonkumulatif)	29.025	
		Jumlah hasil perekayasa teknologi terapan bidang sistem keskanling (paket teknologi, nonkumulatif)	18	
		Jumlah paket desiminasi teknologi terapan bidang sistem keskanling (paket; nonkumulatif)	18	
	Terselenggaranya pengendalian budidaya bidang kesehatan ikan dan lingkungan secara efektif			
		Jumlah kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya dilakukan survailan dan atau monitoring (kab/kota; nonkumulatif)	100	
		Jumlah kawasan budidaya yang mendapat penanganan kualitas lingkungannya (kawasan; nonkumulatif)	100	
		Jumlah obat ikan yang terjamin, mutu, keamanan, dan khasiatnya (obat, kumulatif)	272	
		Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang diambil minimal 96% bebas residu (sampel; nonkumulatif)	4.300	
	Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan sistem keskanling			

		Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Keskanling (persen)	100	
<b>Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan</b>				
	Tersedianya kebijakan pembangunan perikanan budidaya di bidang perbenihan yang implementatif			
		Jumlah RSN1 3 yang tersedia; (Judul, nonkumulatif)	9	
	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya di bidang perbenihan yang berdaya saing dan berkelanjutan			
		Jumlah produksi induk unggul di UPT/UPTD (juta ekor, nonkumulatif)	1	
		Jumlah unit pembenihan yang menggunakan induk unggul (unit, kumulatif)	600	
		Jumlah unit pembenihan ikan air tawar siap sertifikasi (unit, nonkumulatif)	140	
		Jumlah unit pembenihan ikan air payau siap sertifikasi (unit, nonkumulatif)	10	
		Jumlah unit pembenihan ikan air laut siap sertifikasi (unit, nonkumulatif)	10	
		Jumlah hasil perekayasa teknologi terapan bidang perbenihan (paket teknologi)	27	
		Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang perbenihan (paket)	31	
	Terselenggaranya sertifikasi unit pembenihan			
		Jumlah unit pembenihan bersertifikat CP1B (Cara Pembenihan Ikan yang Baik), (unit, kumulatif)	678	
	Terwujudnya sentra kebun bibit rumput laut			



		Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut (kawasan, kumulatif)	300	
	Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan sistem perbenihan			
		Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Perbenihan (%)	100	
<b>Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya</b>				
	Tersedianya kebijakan pembangunan perikanan budidaya di bidang kawasan yang implementatif			
		Jumlah perencanaan penataan kawasan perikanan budidaya (kab/kota, nonkumulatif)	20	
		Jumlah perencanaan detail dan/atau pembangunan kawasan perikanan budidaya (kawasan, nonkumulatif)	34	
		Jumlah RSN1 3 bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya yang disusun (judul, nonkumulatif)	9	
	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya di bidang kawasan yang berdaya saing dan berkelanjutan			
		Jumlah hasil perekayasaan subbidang pembangunan kawasan budidaya (paket teknologi, nonkumulatif)	3	
		Jumlah diseminasi subbidang pembangunan kawasan budidaya (paket, nonkumulatif)	13	
		Jumlah kawasan budidaya yang prasarannya mampu operasional secara tepat guna (kawasan, nonkumulatif)	34	

		Jumlah kelompok partisipatif yang melakukan pemeliharaan infrastrukturnya secara efektif (kelompok, nonkumulatif)	235	
		Jumlah kab/kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya (kab/kota, kumulatif)	190	
		Jumlah stakeholder utama yang terlibat mendukung kawasan minapolitan (stakeholder, kumulatif)	2	
	Tersedianya sarana di kawasan perikanan budidaya			
		Jumlah penerima manfaat peralatan dan mesin perikanan budidaya (kelompok, nonkumulatif)	700	
	Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan sistem perbenihan			
		Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Kawasan Budidaya (persen)	100	
<b>Pengelolaan Pakan Ikan</b>				
	Tersedianya kebijakan pembangunan perikanan budidaya di bidang pengelolaan pakan yang implementatif			
		Jumlah RSN1 3 bahan baku pakan dan pakan ikan (judul, kumulatif)	16	
	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya di bidang pengelolaan pakan yang berdaya saing dan berkelanjutan			
		Jumlah pelaku usaha substitusi bahan baku pakan lokal (unit usaha)	5	
		Persentase penggunaan bahan baku lokal sebagai substitusi dalam kelompok pakan mandiri (persen)	5	

		Jumlah jenis pakan ikan terdaftar (jenis, kumulatif)	1000	
		Jumlah lokasi pakan mandiri (provinsi)	20	
		Jumlah kelompok produsen pakan (kelompok)	200	
		Jumlah kelompok pemakai substitusi pakan alami yang memenuhi persyaratan (unit, kumulatif)	20	
		Jumlah hasil perekayasaan di subbidang pengelolaan pakan (paket, nonkumulatif)	18	
		Jumlah diseminasi teknologi di subbidang pengelolaan pakan (paket, nonkumulatif)	6	
	Terselenggaranya sertifikasi unit produsen pakan			
		Jumlah unit produsen pakan ikan bersertifikat CPPIB (unit, kumulatif)	5	
	Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan pakan ikan			
		Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pakan (persen)	100	
<b>Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan</b>				
	Kebijakan pembangunan bidang produksi perikanan budidaya yang implementatif			
		Jumlah RSN13 bidang pembesaran ikan yang disusun (judul; non kumulatif)	7	
	Tata kelola pemanfaatan sumberdaya bidang produksi perikanan budidaya yang mandiri dan berkelanjutan			
		Jumlah analisis dan publikasi data statistik perikanan budidaya (laporan)	6	

		Jumlah hasil perekayasaan teknik pembudidayaan ikan subbidang pengelolaan produksi dan usaha budidaya (paket teknologi)	14	
		Jumlah lokasi percontohan teknologi anjuran (termasuk biofloc) (lokasi, nonkumulatif)	124	
	Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik pada unit pembudidaya ikan			
		Unit pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar (unit, kumulatif)	10.980	
	Skala usaha kelompok masyarakat di bidang pembudidayaan ikan			
		Jumlah kelompok masyarakat yang tingkatkan skala usahanya di bidang perikanan budidaya (kelompok)	700	
	Kemandirian usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan			
		Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi (orang, nonkumulatif)	500	
		Jumlah penyiapan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya (bidang, nonkumulatif)	15.000	
		Jumlah unit usaha budidaya yang mendapat layanan perizinan (unit, kumulatif)	700	
		Jumlah Paket Promosi Perikanan Budidaya (paket, nonkumulatif)	15	
	Terselenggaranya kegiatan ketatausahaan kegiatan pengelolaan produksi dan usaha			
		Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Produksi dan Usaha (%)	100	

<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya</b>				
	Tersedianya ASN KIKP yang kompeten dan profesional			
		Indeks kesenjangan kompetensi pejabat struktural dan fungsional lingkup DJPB (%)	<14%	
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Manajemen PNS lingkup DJPB	100	
	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses			
		Indeks Pemanfaatan Informasi DJPB Berbasis TI (%)	>75%	
	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi			
		Nilai Penerapan RB DJPB	A	
		Nilai SAKIP DJPB	A	
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien			
		Nilai efisiensi anggaran DJPB	>95%	
	Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran			
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPB (%)	100	
		Persentase pemenuhan layanan perkantoran DJPB (%)	100	
<b>PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KP</b>				<b>1,991.15</b>
	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan	Nilai ekspor hasil perikanan (US\$ Miliar)	<b>6.82</b>	
		Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional (Kg/Kap)	<b>43.88</b>	

		Volume produk olahan hasil perikanan (juta ton)	<b>5.9</b>	
		Nilai investasi hasil KP (Rp. Triliun)	<b>3.52</b>	
		Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp. miliar)	<b>320</b>	
	Meningkatnya daya saing produk dan logistik KP	Nilai produk kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	<b>275</b>	
		Ketersediaan Pasokan ikan di UPI (%)	<b>60</b>	
	Meningkatnya kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan	Nilai Tukar Pengolah	<b>102</b>	
<b>Penguatan Logistik Hasil KP</b>				
	Meningkatnya ketersediaan pasokan ikan			
		Jumlah pelaku usaha logistik yang dibina (pelaku usaha)	300	
		Jaminan pasar produksi hasil tangkapan dan budidaya (kelompok)	1.700	
		Data dan informasi neraca ketersediaan ikan di koridor SLIN (lokasi)	100	
		Profil lokasi logistik (lokasi)	100	
		Presentase nilai impor terhadap nilai ekspor pada tahun berjalan dalam rangka pengendalian (%)	< 20	
		Selisih harga ikan di tingkat produsen dan pasar grosir (%)	100	
		Kerjasama antarpelaku usaha logistik hasil perikanan (pelaku usaha)	300	
		Jumlah analisis kebutuhan infrastruktur di koridor logistik ikan nasional (lokasi)	100	
		Pembinaan pemanfaatan infrastruktur logistik di koridor logistik ikan nasional (lokasi)	60	
		Fasilitasi sarana dan prasarana logistik (unit)	20	

		Jumlah gudang beku ( <i>cold storage</i> ) yang tersedia di daerah sentra perikanan (unit)	40	
	Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Sistem Logistik	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Sistem Logistik (dokumen)	1	
<b>Akses Pasar dan Promosi Hasil KP</b>				
	Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil KP			
		Penanganan hambatan ekspor hasil kelautan dan perikanan (kawasan)	3	
		Peningkatan <i>market share</i> produk KP utama di pasar tujuan ekspor (%)	15	
		Peningkatan nilai ekspor ke negara mitra (%)	15	
		Nilai transaksi dampak promosi di luar negeri (juta US\$)	200	
		Kontribusi protein ikan terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani (%)	60	
		Partisipasi masyarakat dalam gerakan makan ikan (organisasi)	20	
		Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pasar (lokasi)	200	
		Jumlah pembinaan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar (lokasi)	200	
		Jumlah peta kebutuhan ikan berdasarkan preferensi konsumen (lokasi)	34	
		Jumlah supplier hasil KP yang teregistrasi (supplier)	4.500	
		Jumlah festival perikanan Nusantara dan lomba aneka masakan (paket)	35	
		Jumlah inovasi menu masakan berbahan baku ikan (paket)	35	
		Jumlah lokasi penataan sentra kuliner hasil perikanan (lokasi)	5	

		Sistem informasi pemasaran hasil perikanan (paket)	1	
	Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Akses Pasar dan Promosi	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Akses Pasar dan Promosi (dokumen)	1	
<b>Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan</b>				
	Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk perikanan			
		Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang disusun (RSNI)	5	
		Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) produk perikanan yang dievaluasi penerapannya (SNI)	10	
		Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (SKP)	790	
		Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan (UPI)	1000	
		Utilitas UPI (%)	81	
		Jumlah ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (Ragam)	40	
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dianalisa dalam rangka memenuhi standar mutu dan diversifikasi produk perikanan (Lokasi)	35	
		Jumlah kerja sama pelaku usaha yang terbentuk (kerja sama)	300	

		Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dimanfaatkan dalam rangka memenuhi standar mutu dan diversifikasi produk perikanan (lokasi)	25	
	Meningkatnya mutu produk olahan hasil perikanan di sentra perikanan terpadu	Lokasi pengembangan mutu pengolahan hasil perikanan di sentra perikanan terpadu (lokasi)	4	
	Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan	Dukungan manajemen Direktorat Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (Dokumen)	1	
<b>Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan</b>				
	Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk kelautan			
		Jumlah UMKM produk kelautan yang dibina (UMKM)	840	
		Jumlah usaha besar produk kelautan yang dibina (usaha besar)	50	
		Jumlah lokasi fasilitas sarana dan prasarana produk kelautan (lokasi)	50	
		Jumlah lokasi pemanfaatan sarana dan prasarana produk kelautan (lokasi)	40	
		Jumlah rancangan SNI yang disusun dalam penguatan mutu dan diversifikasi produk kelautan (RSNI)	5	
		Jumlah SNI yang diterapkan dalam penguatan mutu dan diversifikasi produk kelautan (SNI)	5	
		Nilai produk nonbioteknologi kelautan (Rp. Triliun)	12.78	
		Jumlah lokasi pembinaan diversifikasi ragam produk nonbioteknologi (lokasi)	40	

		Jumlah lokasi pembinaan diversifikasi ragam produk bioteknologi (lokasi)	20	
		Nilai produk bioteknologi kelautan (Rp. Miliar)	220	
	Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan (dokumen)	1	
<b>Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil KP</b>				
	Meningkatnya investasi dan usaha hasil kelautan dan perikanan			
		Data dan statistik usaha dan investasi hasil KP yang akurat (dokumen)	5	
		Jumlah usaha hasil KP yang melakukan kemitraan dalam rangka mendorong investasi (unit usaha)	150	
		Jumlah UMKM hasil KP yang mendapat pembiayaan (unit usaha)	500	
		Jumlah lembaga usaha hasil KP yang dibentuk dalam rangka realisasi investasi (lembaga usaha)	80	
		Jumlah lembaga usaha hasil KP yang ditingkatkan dan difasilitasi dalam rangka realisasi investasi (lembaga usaha)	600	
		Jumlah pelaku usaha hasil KP yang mendapat fasilitas pelayanan investasi (pelaku usaha)	500	
		Jumlah unit usaha hasil KP yang melakukan investasi (unit usaha)	100	
		Jumlah tenaga kerja yang dibina dalam rangka menuju usaha yang <i>feasible</i> (orang)	800	
	Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Pengembangan Investasi	Dukungan manajemen Direktorat Pengembangan Investasi (dokumen)	1	

<b>Pengujian Penerapan Hasil Perikanan</b>				
	Meningkatnya pengujian penerapan hasil perikanan			
		Uji terap inovasi teknologi hasil KP (ragam)	10	
		Uji terap inovasi pemasaran hasil KP (ragam)	3	
		Jumlah penyiapan bahan RSNI pengolahan dan pemasaran (bahan RSNI)	5	
		Jumlah produk bersertifikat SNI (Produk)	9	
		Jumlah data uji nutrisi dan mutu produk perikanan (Data)	600	
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi inkubasi bisnis/pengembangan usaha (UMKM)	9	
		Masyarakat yang menerima informasi inovasi teknologi BBP2HP	2.000	
	Terfasilitasinya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BBP2HP	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BBP2HP (dokumen)	1	
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDSKP</b>				
	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6,5	
	Terwujudnya ASN Ditjen PDSKP yang kompeten, profesional, dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas	75	
	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	50	
	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai kinerja reformasi birokrasi Ditjen PDSKP	BB	

	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran Ditjen PDSKP (%)	Baik (80-90)	
		Opini atas laporan keuangan Ditjen PDSKP	WTP	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT</b>				<b>1,771.41</b>
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat petambak garam	Nilai tukar petambak garam	102	
	Meningkatnya kualitas garam rakyat	Persentase kualitas garam KP1 terhadap total keseluruhan (%)	60	
		Jumlah produksi garam rakyat	3.6	
	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	Jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal di PPK yang direvitalisasi (komunitas)	5	
		Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan)	3	
	Terwujudnya Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri (pulau)	10	
	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan	Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang meningkatkan efektivitas pengelolannya (kawasan)	28	
		Jumlah luas kawasan konservasi (juta ha)	17.1	
		Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan dilestarikan (jenis)	15	
		Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (kawasan)	55	
		Perairan laut NKRI yang memiliki dokumen RTD, N	1	
		Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4	

	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan	Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan)	40	
<b>Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut</b>				
	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan			
		Penambahan luas kawasan konservasi (juta ha)	0.6	
		Jumlah kawasan konservasi perairan yang meningkat kualitas lingkungannya melalui upaya pengelolaan efektif (kawasan)	28	
		Kawasan konservasi perairan yang difasilitasi upaya pemanfaatannya untuk peningkatan pendapatan masyarakat (kawasan)	20	
	Terwujudnya pengelolaan jenis ikan terancam punah yang dindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan dilestarikan (jenis)	15	
	Terwujudnya jejaring/kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif	Jumlah kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif (kelompok/masyarakat)	5	
	Terselenggaranya penatausahaan Direktorat KKH, yang tepat waktu	Persentase penatausahaan Direktorat KKH, yang tepat waktu (%)	100	
<b>Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan</b>				
	Meningkatnya kualitas garam rakyat	Persentase kualitas garam KP1 terhadap total keseluruhan (%)	60	
	Terselenggaranya produksi dan usaha petambak garam rakyat			
		Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha)	26,000	

		Jumlah sarana niaga garam rakyat (unit)	11	
	Terwujudnya pemanfaatan air laut nonenergi dan BMKT	Jumlah kawasan yang dikelola untuk pemanfaatan air laut nonenergi dan BMKT	13	
	Tertatanya pipa/kabel bawah laut untuk pengembangan ekonomi	Jumlah kawasan alur laut yang ditata untuk pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut (kawasan)	3	
	Terwujudnya pengelolaan kawasan wisata bahari	Jumlah kawasan yang dibangun sarana prasarana untuk wisata bahari (kawasan)	3	
	Terselenggaranya penatausahaan Direktorat JK yang tepat waktu	Persentase penatausahaan Direktorat JK yang tepat waktu (%)	100	
<b>Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil</b>				
	Bertambahnya ekonomi di pulau-pulau kecil/terluar	Jumlah pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya (pulau)	25	
	Terwujudnya penataan pulau-pulau kecil/terluar	Jumlah pulau-pulau kecil termasuk PPKT yang tertata lingkungannya dan tahan terhadap bencana dan perubahan iklim (pulau)	20	
	Terwujudnya investasi di pulau-pulau kecil	Jumlah gugus pulau kecil yang diinvestasikan dalam menunjang pengembangan ekonominya (pulau)	10	
	Tervalidasinya pembakuan nama pulau kecil	Jumlah pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya (pulau)	500	
	Revitalisasi masyarakat adat, tradisional, dan lokal (komunitas)	Jumlah komunitas masyarakat adat, tradisional dan lokal di PPK yang direvitalisasi (komunitas)	5	
	Terselenggaranya penatausahaan Direktorat PPK yang tepat waktu	Persentase penatausahaan Direktorat PPK yang tepat waktu (%)	100	
<b>Pendayagunaan Pesisir</b>				
	Terwujudnya kawasan pesisir yang direstorasi	Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi (kawasan)	5	
	Terwujudnya sarana dan prasarana di kawasan pesisir			

		Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi kegiatan reklamasi dan pengembangan sarana dan prasarannya (kawasan)	8	
		Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengelolannya secara terpadu (kawasan)	4	
	Terwujudnya ketangguhan kawasan pesisir	jumlah kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya (kawasan)	25	
	Rehabilitasi kawasan pesisir di pantura Jawa			
		jumlah kawasan di pesisir/pantura Jawa yang direhabilitasi:		
		- Bakau (Batang)	4,000,000	
		- Sabuk Pantai (km)	15	
		- Rekayasa Hybrid (km)	50	
	Terselenggaranya penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pesisir yang tepat waktu	Persentase penatausahaan Direktorat PP yang tepat waktu (%)	100	
<b>Perencanaan Ruang Laut</b>				
	Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Laut Nasional	Perairan laut NKRI yang memiliki dokumen RTRLN	1	
	Tersusunnya rencana zonasi di wilayah laut, selat, dan teluk antarwilayah	Jumlah wilayah laut antarwilayah, KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan	29	
	Tersusunnya dokumen masterplan pulau-pulau kecil terluar	Jumlah lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKCT) yang memiliki dokumen Masterplan	11	
	Terevaluasinya substansi dan akselerasi legalitas dokumen RZWP3K	Jumlah provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan	10	
	Terevaluasinya substansi dan akselerasi legalitas dokumen RZWP3K	Tersedianya data dan sistem informasi perencanaan ruang laut	15	
	Terselenggaranya penatausahaan Direktorat PRL yang tepat waktu	Persentase penatausahaan Direktorat PRL yang tepat waktu (%)	100	

<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut</b>				
	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6,5	
	Tersedianya ASN KKP yang kompeten dan profesional	Indeks kesenjangan kompetensi pejabat struktural dan fungsional lingkup Ditjen PRL (%)	<14%	
	Tersedianya informasi yang valid, handal, dan mudah diakses	Indeks Pemanfaatan Informasi Ditjen PRL Berbasis TI (%)	>75%	
	Terselenggaranya reformasi birokrasi	Nilai penerapan reformasi birokrasi Ditjen PRL	A	
		Nilai SAKIP Ditjen PRL	A	
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien	Nilai efisiensi anggaran Ditjen PRL	>95%	
	Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran			
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Ditjen PRL (%)	100	
		Persentase pemenuhan layanan perkantoran Ditjen PRL (%)	100	
<b>PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KP</b>				<b>2,033.50</b>
	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	73.0%	
		Persentase cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP	65.9%	
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	85.0%	



		Persentase kataatan pelaku usaha perikanan di wilayah perbatasan	73.0%	
	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang menerima bantuan	510 kelompok	
<b>Pengoperasian Kapal Pengawas</b>				
	Terselenggaranya Pengawasan WPPNRI dari kegiatan <i>IUU Fishing</i> dan kegiatan yang merusak SDKP yang profesional dan partisipatif	Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU Fishing</i> dan merusak SDKP di WPPNRI	144 hari	
		Jumlah hari operasi pesawat patroli dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU Fishing</i> dan merusak SDKP di WPPNRI	120 hari	
		Jumlah wilayah laut perbatasan yang diawasi untuk mencegah nelayan pelintas batas	4 wilayah	
		Jumlah awak kapal pengawas yang mumpuni dan memenuhi kualifikasi	124 orang	
		Jumlah kapal pengawas yang siap operasi	35 unit	
	Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat Kapal Pengawas	Persentase penatausahaan Direktorat Kapal Pengawas yang tepat waktu	100%	
<b>Penanganan Pelanggaran Bidang KP</b>				
	Penanganan dan penyelesaian tindak pidana KP yang efektif dan terpadu			
		Penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	85 %	
		Persentase penyelesaian penanganan barang bukti dan awak kapal yang disidik dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	85%	

		Persentase tindak pidana KP yang selesai disidik (P-21) yang dapat dipantau proses tindak lanjutnya	82%	
	Terlindungnya nelayan Indonesia pelintas batas dan diduga melakukan pelanggaran perikanan di negara lain	Persentase nelayan Indonesia yang difasilitasi pemulangnya karena terindikasi melakukan lintas batas dan pelanggaran bidang perikanan di negara lain	82%	
		Jumlah wilayah perbatasan yang nelayannya difasilitasi dan diberikan pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain (provinsi)	7	
	Koordinasi antaraparat penegak hukum dalam rangka penyelesaian tindak pidana KP	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan dan Kelautan yang Terbentuk dan Terselenggara	34 provinsi	
		Persentase data dan informasi TPKP nasional yang terintegrasi dengan instansi terkait, akurat dan handal	85%	
	Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan baru yang kompeten dan aparat penegak hukum di bidang KP yang meningkat kemampuan teluas di bidang KP	Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten	60 org	
		Jumlah aparat penegak hukum di bidang KP yang direkrut/ditingkatkan pengetahuan teknis bidang KP	60 org	
	Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat Penanganan Pelanggaran	Persentase penatausahaan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang tepat waktu	100%	
<b>Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan</b>				

	Terselenggaranya pengawasan kawasan konservasi dan ekosistem perairan yang profesional dan partisipatif			
		Persentase ketaatan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	60%	
		Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	8 jenis	
	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha jasa kelautan dan sumber daya nonhayati lainnya yang profesional dan partisipatif	Persentase ketaatan pelaku pemanfaatan jasa kelautan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	55%	
	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang profesional dan partisipatif	Persentase ketaatan pelaku usaha pemanfaatan pesisir terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	35%	
		Persentase ketaatan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan secara bertanggung jawab	Jumlah wilayah yang diadakan sosialisasi peraturan dan meningkat ketaatan dalam pemanfaatan SDKP (provinsi)	34	
	Tersedianya Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [POLSUS PWP3K] baru yang kompeten	Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten (orang)	100	
	Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Persentase penatausahaan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang tepat waktu	100%	
<b>Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</b>				

	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang profesional dan partisipatif	Persentase ketaatan unit usaha penangkapan ikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	93.37%	
		Persentase ketaatan unit usaha pengolahan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	88.29%	
		Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	82.23%	
		Persentase ketaatan importasi ikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	92.00%	
	Kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif dalam membantu pengawasan SDKP	Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP	1.639 kelompok	
	Terselenggaranya pengelolaan administrasi dan penatausahaan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Persentase penatausahaan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang tepat waktu	100%	
<b>Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan</b>				
	Terpenuhinya infrastruktur, sistem informasi, dan komunikasi pengawasan SDKP terintegrasi dan tepat waktu			
		Jumlah sistem pengawasan SDKP berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, operasional dan terintegrasi	4 Sistem	
		a. Regional Monitoring Center (RMC)	-	
		b. Surat Keterangan Aktifasi Transmitter (SKAT) on line	2	
		c. Sistem Integritas	1	
		e. Automatic Identification System (AIS)	1	
		f. Radar Pantai		

		Jumlah pemenuhan sarana prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu	45	
		a. Kapal Pengawas	3	
		- Tipe A, panjang > 50 meter	2	
		- Tipe B, panjang > 40 s.d 50 meter	1	
		- Tipe C, panjang > 30 s.d 40 meter	0	
		- Tipe D, panjang > 20 s.d 30 meter	-	
		- Tipe E, panjang > 16 s.d 20 meter	-	
		b. Speedboat Pengawas	5	
		c. Kantor Pengawas	10	
		d. Dermaga kapal pengawas	1	
		e. Bangunan Operator	10	
		f. Gudang Barang Bukti	10	
		g. Gudang Logistik Kapal Pengawas	0	
		h. Rumah Penampungan ABK Non Yustisia	0	
		i. Pos Pengawasan	0	
		j. Pesawat Patroli Pengawasan (Patrol Planes)	6	
		k. Shelter (Komplek Hunian) ABK Kapal Pengawas	0	
		l. PUSDAL	0	
		Jumlah kawasan konservasi dan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dipantau dan dianalisis		
		- Kawasan konservasi	18	
		- Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	6	
		Persentase kapal perikanan yang taat terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan	80%	
		Persentase usaha budidaya dan pengolahan ikan yang dapat dipantau	75%	
		Persentase penatausahaan Direktorat Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan peningkatan infrastruktur pengawasan yang tepat waktu	100%	

<b>Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP</b>				
	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6,5	
	Terwujudnya ASN Ditjen PSDKP yang kompeten, profesional, dan berkepribadian	Indeks kompetensi dan integritas ASN Ditjen PSDKP	<14%	
		Jumlah pengembangan SDM pengawasan yang kompeten sesuai kebutuhan	200 orang	
		Jumlah pejabat fungsional pengawas SDKP	60 orang	
	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	>75%	
	Terwujudnya birokrasi Ditjen PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Peningkatan Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP	BB	
		Nilai SAKIP Ditjen PSDKP	A	
		Jumlah kerja sama nasional dan internasional bidang pengawasan SDKP yang disepakati	2	
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien	Nilai kinerja anggaran lingkup Ditjen PSDKP	Baik (80-90)	
	Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Ditjen PSDKP(%)	100%	
		Persentase pemenuhan layanan perkantoran Ditjen PSDKP(%)	100%	
<b>PROGRAM KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</b>				<b>741.26</b>
	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	8	

	Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha KP dalam ekspor, impor, dan antararea	Persentase kepatuhan ( <i>compliance</i> ) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan KP di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antararea (%)	73	
		Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus)	≤ 10	
	Terwujudnya pencegahan penyebaran HPIK, pengendalian mutu dan kreamanan hayati ikan yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan	Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor (unit)	575	
		Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	84	
		Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan bersifat invasif melalui kajian analisis resiko (jenis)	10	
		Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan melalui sertifikasi karantina (%)	10.38	
<b>Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantina dan Keamanan Hayati Ikan</b>				
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina, jaminan mutu, dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif			
		Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk kedalam wilayah RI (%)	80	
		Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantina dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan (%)	95	

		Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan bersifat invasif	56	
	Terpetakannya sebaran penyakit ikan karantina	Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina (lokasi)	339	
	Tersedianya kebijakan perkarantina, mutu, dan keamanan hayati ikan yang partisipatif	Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang perkarantina dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan (dokumen)	2	
	Terselenggaranya sistem perkarantina dan pengendalian keamanan hayati ikan yang sesuai standar			
		Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (sertifikat)	32,500	
		Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (sertifikat)	139,000	
		Jumlah instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan (unit)	230	
		Jumlah negara yang harmonis dalam standar penerapan sistem perkarantina ikan (negara)	2	
	Meningkatnya UUPI yang menerapkan CKIB	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) (unit)	175	
	Terselenggaranya penatausahaan Pusat Karantina Ikan	Persentase penatausahaan Pusat Karantina Ikan dan Keamanan Hayati Ikan yang tepat waktu (%)	100%	
<b>Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>				
	Terselenggaranya sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar	Persentase produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (%)	75	

		Lokasi perairan laut yang dipetakan dari cemaran <i>marine biotoxin</i> dan logam berat (lokasi)	5	
		Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang teregistrasi negara mitra (unit)	150	
		Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi)	27	
		Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor	82.000	
		Jumlah pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem <i>traceability</i> (UPI)	22	
	Meningkatnya sertifikat jaminan mutu (HACCP) pada UPI	Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan	1.300	
	Tersedianya kebijakan mutu dan keamanan hasil perikanan yang partisipatif	Jumlah draft peraturan perundangan undangan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (dokumen)	1	
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	Persentase penanganan kasus pelanggaran sistem mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (%)	95	
	Terselenggaranya penatausahaan pusat sertifikasi mutu	Persentase penatausahaan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tepat waktu (%)	100	
<b>Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan</b>				
	Terselenggaranya sistem manajemen dan kerja sama perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan mutu			
		Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 (unit)	13	
		Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020 (unit)	12	
		Jumlah laboratorium yang memenuhi persyaratan laboratorium penguji	17	

		Jumlah unit kerja lingkup otoritas kompeten yang menerapkan Sistem Pengendalian Mutu (unit kerja)	23	
		Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang mengikuti uji kompetensi (orang)	200	
		Jumlah RSNI metode pengujian	4	
		Jumlah jenis pengujian yang dilakukan uji banding	1.100	
		Jumlah jenis parameter uji yang di profisiensi	4	
		Jumlah negara yang harmoni/kerja sama dalam sistem perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan (MoU/MRA/Approval)	35	
		Jumlah perjanjian kerja sama antarlembaga di bidang perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan	3	
		Jumlah kerja sama bilateral, regional, multilateral di bidang perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan (paper)	4	
	Tersedianya kebijakan publik perkarantinaan, keamanan hayati, mutu, dan keamanan hasil perikanan			
		Jumlah kebijakan publik bidang perkarantinaan ikan, yang diselesaikan (dokumen)	3	
		Jumlah kebijakan publik bidang mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (kebijakan)	2	
	Terselenggaranya sistem pengendalian dan pengawasan			

		Tingkat keberhasilan pengawasan di <i>exit</i> dan <i>entry point</i> wilayah perbatasan (%)	73%	
	Terselenggaranya penatausahaan pusat manajemen mutu	Persentase penatausahaan Pusat Standarisasi, Kepatuhan, dan Kerja Sama yang tepat waktu (%)	100	
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>				
	Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	6,5	
	Terwujudnya ASN BKIPM yang kompeten, profesional, dan berkepribadian	Indeks Kompetensi dan Integritas lingkup BKIPM	75	
	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja lingkup BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	50%	
	Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM	BB	
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran BKIPM	>95%	
	Terpeenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai BKIPM (%)	100	
		Persentase pemenuhan layanan perkantoran BKIPM (%)	100	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUJJIASTUTI